SEJARAH KERUNTUHAN SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI BENGKULU

R. Ade Hapriwijaya Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Bengkulu Jln. Pembangunan No. 1 Padang Harapan, Bengkulu 38255 hapriwijaya@gmail.com

Abstract: Differences regarding History of the Collapse of the Traditional Government System in Bengkulu. British legal thinking and practices of Bengkulu customary law were a source of chaos and disputes. This led to an important decision being made in 1778 to change and overhaul some of these local practices, especially those which could harm pepper plantations, while British officials were only observers of the district court. After 1778 British officials in the district were required to take part in important matters. With this reform a lot of progress was made but it was still hampered by the ongoing acts of corruption, as well as the importance of abuse of power by local and Depati Government officials. Economic problems continued, until 1785 settlements on the West coast were changed to Residency and administrative regions were expanded.

Keywords: Collapse, Government System, Bengkulu.

Abstrak: Sejarah Keruntuhan Sistem Pemerintahan Tradisonal di Bengkulu. Perbedaan-perbedaan mengenai pemikiran hukum Inggris dan praktek-praktek hukum adat Bengkulu menjadi sumber kemelut dan sengketa. Hal ini mendorong diambilnya suatu putusan penting dalam tahun 1778 untuk mengubah serta merombak beberapa praktek lokal tersebut, khususnya yang dapat merugikan perkebunan lada, sedangkan pegawai Inggris hanya sebagai peninjau pada peradilan distrik. Setelah 1778 pegawai Inggris di distrik diwajibkan ambil bagian dalam perkara yang penting. Dengan reformasi ini banyak kemajuan yang diperoleh tetapi masih terhambatdengan adanya perbuatan korupsi yang terus menerus, serta pentingnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai Pemerintah Inggris dan Depati setempat. Pesoalan ekonomi terus berlanjut, hingga tahun 1785 pemukiman dipesisir Barat diubah menjadi Karesidenan dan daerah-daerah administratif diperluas.

Kata Kunci: Keruntuhan, Sistem Pemerintahan, Bengkulu.

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan di Bengkulu para Pangeran mempunyai status yang tinggi. Status yang tinggi tidak berarti mempunyai kekuasaan atas rakyatnya.1 Namun pihak Inggris menggambarkan, struktur pemerintahan tradisional didalam wilayah Bengkulu serta pemilikan kekuasaan dari para Rajaraja yang terbatas disebabkan oleh kelemahan para Pangeran sendiri. Pendapat ini disebabkan oleh pengetahuan mereka mengenai sifat kekuasaan adat Bengkulu yang tidak memadai, menjadi sebab utama dari kesalahpahaman. Tetapi melihat dari

keuntungan perdagangan yang akan diperoleh dari Bengkulu, serta kecemasan untuk sedikit campur tangan dalam urusan-urusan negeri, telah merestui penglihatan tanggung jawab kepada kepala adat yang tidak biasa untuk memberikan pemerintah-pemerintah yang mendadak kepada rakyat atau anak buah.

Untuk memperlancar kepentingan mereka di Bengkulu, pemerintah kolonial Inggris membuat perjanjian dengan Pengeran-pangeran yang ada di Bengkulu; yaitu Pangeran Sungai Lemau dan Sungai Itam pada tahun 1685, sedangkan dengan pangeran Silebar

tahun 1695. Dalam perjanjian tersebut pemerintah Inggris menuntut kepada ketiga Pangeran untuk menghimpun semua hasil lada yang terdapat diwilayah mereka untuk kepentingan kompeni Inggris. Perjanjian ini diperbaharui tahun 1724 dengan Sungai Lemau dan Sungai Itam.

Perjanjian baru tersebut mewajibkan semua petani lada untuk menanam lada menurut kuota minimum. Perjanjian serupa juga dilakukan dengan Sultan Anak Sungai yang terletak di Utara Bengkulu, di Bengkulu Selatan dengan Depati di Seluma, Manna, Kaur dan Krui. Depati diwilayah tersebut diwajibkan untuk melakukan pengawasan wajib tanam, melakukan pemeriksaan secara teratur bertanggung jawab terhadap pembayaran harga lada. Setelah masalah wajib tanam dapat dilaksanakan oleh kepala adat, pada tahun 1758 kepala adat diminta oleh Pemerintah Inggris untuk melarang menyabung ayam dan judi.²

Pembahasan

Sebenarnya pihak Inggris menghendaki agar Pangeran dan Kalipa melebarkan batas kekuasaan tradisional untuk kepentingan bertanam lada. Namun kolonial Inggris juga telah merampas hak mereka untuk mengutip hasil yang merupakan imbol yang paling berarti dari status mereka, sehinggan mereka enggan untuk menyerahkan privilesse (hak istimewa) yang ada kepada kolonial Inggris.

Keengganan tersebut pertama kali diperintahkan oleh Pangeran dari Sungai Lemau. Pemerintah Inggris mengutus misi untuk mengadakan perundingan dengan Pangeran Sungai Lemau. Para perunding tersebut menulis tentang perundingan tersebut "pada mulanya Pangeranj bersedia untuk memenuhi keinginan kita, kemudian tetapi bertingkah karena banyak menyinggung masalah Prerogative (hak Pangeran), demikian yang besat sehingga mengurangi kedaulatannya, selain itu juga merupakan sumber pemasukan keuangan baginya, sehingga keadaannya menjadi lebih akan buruk sebelumnya". Tetapi akhirnya Pangeran bersedia menerima konsei setelah pemaerintah Inggris mengganti hasil, yaitu janji pemerintah Inggris untuk membayar sebanyak satu dollar untuk setiap bahar lada yang diekspor dari Tetapi wilayah mereka.3 dengan memperhitungkan akan kewajiban terhadap adat dari Pangeran untuk membagi hasil yang sekarang diganti oleh cukai yang dibayar secara tidak tetap oleh Inggris kepada kepala yang lebih rendah. Dengan demikian ssumber pemaukan tersebut hampir dapat memenuhi kebutuhan hidup dan lebih mengangkat status para Pangeran. Merosotnya jumlah pengahasilan sangat mengancam kehidupan para Pangeran.

Bahkan William Marsden, dalam studinya tentang orang Rejang, telah mengatakan bahwa Pangeran ebagai "kepala-kepala feodal" yang karena kelemahan mereka sendiri, sehingga tidak dapat untuk menjatuhkan pemerintah, yang membuat mereka disegani dan dipatuhi. Dia mempunyai sebagaimana yang harapan menjadi harapan para atasannya, bahwa sitem lokal tersebut "apabila mendapat nilai yang lebih" akan mampu berfungsi berdasarkan asas-asas sistem feodal.4

Dengan bertindak berdasarkan perkiraaan demikian, pihak yang pemerintah kolonial Inggris berusaha untuk membina suatu kelas penguasa cukup kuat dan tangguh. yang Pemerintah kolonial Inggris dapat mengatur secara lebih mudah dan menjadikannya suatu kebijaksanaan yang disengaja untuk memberikandukungan apa saja bagi para kepala adat yang memperlihatkan kemauan kerjasama dengan mereka. Dengan demikian Depati semakin merupakan alat bagi kompeni Inggris. Pendapat mereka tidak diperhatikan dantidak dipedulikan oleh pemerintah Inggris, bahkan rakyat (anak buah) ssudah tidak percfaya lagi kepada Depati, karena mereka terlalu percaya kepada dukungan pihak Kompeni Inggris.

Apabila kewajiban-kewajiban warisan adat antara para kepala adat dan rakyat (anak buah) tidak bergema secara timbal balik, banyak cacat dalam perilaku dari kedua belah pihak. Kepala adat tidak egan lagi untuk menerapkan wewenang pengawasannya ecara korup ata hail produksi lada, lebih-lebih bila mereka menemukan mitra dikalangan pegawai kompeni untuk menjalankan ekploitasi lada. Tindakan-tindakan dari para kebun penguasa lada (Depati dan pegawai Eropa) dalam penggunaan timbangan yang tidak benar dan pembayaran harga lada yang jauh lebih murah dari yang telah ditetapkan. Tidak menimbul persaingan jarang antara pegawai pemerintah dengan kepala adat setempat yang menjurus kepada perpecahan dan putusnya hubungan mereka. Keadaan ini menjadi lebih serius karena tidak terdapat pembatasan yang jelas mengenai kekuasaan serta fungsi dari para penguasa. Kenyataan ini diungkapkan oleh para Kalipa di Manna mengenai peranan pelengkap dijalankan oleh para pegawai "hukum negeri ini ada didalam tangan para kepala adat. Tetapi, kekuasaan berada ditangan kompeni." Dalam dinamika struktur penjajahan kerjasama dan saling pengertian kedua belah pihak merupakan suatu keharusan, tetapi bila tujuannya kepentingan untuk pribadi akan mengorbankan kesejahteraan rakvat. Kerjasama ini terlihat dalam eksploitasi lada, dimana Kalipa dan Pemerintah Inggris sama-sama mencari keuntungan.

Dalam teorinya, pihak pemerintah Inggris harus membatasi kegiatan mereka secara ketat dalam masalah lada saja, sedangkan masalah adat dan persoalan peradilan sepenuhnya dilakukan oleh kepala adat. Tetapi nyatanya tidak dapat terlaksana, karena banyak permasalahan penanaman, yang berhubungan erat dengan hukum adat dan peradilan, sehingga memaksa secara tidak langsung pemerintah kolonial Inggris campur tangan.

Untuk mengatasi masalah korupsi dan pertentangan adat ini, pemerintah Inggris mengutus Walter Ewer dalam tahun 1800 sampai 1805 sebagai Residen di Bengkulu. Ewer diberi kuasa penuh untuk melakukan hukuman terhadap Dewan Pangeran, serta menyatakan sebagai penanggungjawaban tertinggi dari peristiwa setempat.⁵ Bertindak atas petunjuk dari atasannya di India, sasaran utama Ewer adalah penghematan. Untuk Residen W. Ewer menghapus kedudukan Inggris di Kaur dan Krui dan memasukkannya ke wilayah Manna dan

Muko-muko. Perluasan wilayah administratif diharapkan akan dapat meringankan kerja kompeni dalam bidang adminitratifnya.

Dengan penghapusan kedudukan Inggri di Kaur dan Krui, Residen berusaha untuk mengatur tuntutan daripada kepala adat, dengan patokan untuk meghapus segala gelar yang tidak perlu. Panya penuntut yang kuat bukti tercatat diakui sebagai Pangeran, sedangkan lain hanya yang diperkenankan untuk memperoleh bagian pajak yang berhak diterima mereka sebagai Kalipa. Kebijaksanaan yang baru ini tidak dapat dielakkan dan menyebabkan rasa tidak puas sserta mereka dendam dikalangan yang gelarnya dicopot.6

Kedatangan W. Ewer ke Bengkulu dalam membawa suatu perubahan bidang pertanian, vaitu diperkenalkannya "free garden" yang berada dibawah pengawasan Pobert Samuel Perreau yang memiliki kekuasaan khusus untuk membina hubungan yang lebih berifat langsung dan segera antara pemerintah dan petani. Dengan adanya hubungan langsung ii maka gugatanyang ditujukan kepada penguasa ke Dewan Pangeran di Fort Marlborough dapat dihindari. Tindakan ini dilakukan setelah kegagalan para kepala distrik untuk menyelesaikan masalah gugatan ssecara Sebenarnya lokal. pola baru menguntungkan keuangan bagi Pangeran Sungai Lamau dan Sungai Itam, namun Pangeran Sungai Lamau merasa cemas dengan kekuasaan khusus yang diberikan kepada Perreau tersebut. Dengan alasan akan mengurangi pengaruh Pangeran ungai Lemau terhadap rakyatnya.

Reformasi yang dilakukan Residen W. Ewer, secara tidak langung telah menguburkan kekuasaan dari Pangeran Lingang Alam. Dengan tujuan menerapkan sitem pemerintahan yang modern, Residen menghapus klem-klem pajak tradisional dari Pangeran atas hasilhasil padi, kayu, bambu. Selain itu Pangeran juga kehilangan pendapatan 250 dollar Spanyol perbulan dari pajak,7 ini sangat menyakitkan Pangeran.

Istem "free garden" atau tanam paksa yang dilakukan pada masa W. Ewer dihentikan oleh Letnan Gubernur Raffles pada tahun 1818. Awal kedatangannya di Bengkulu, Raffles telah menekankan arti pentingnya dari kemerdekaan sebagai dorongan yang sangat perlu bagi uaha dan daya upaya ukarela. Namun, kekuasaan dijalankan oleh wakil kompeni Inggris semakin bertambah, sehingga menimbulkan pertentangan yang terus menerus dan dikutuk sebagaimana Raffles mencatat:8

"Residen merupakan hakim dan magistrat didalam wilayahnya, serta menjalankan kekuasaannya yang hampirhampir tidak terkontrol dalam pengadilan anak negeri. Menangani polisi, dia bertindak menurut kemauan sendiri, danpetani telah ditahan atau dilepakan menurut pertimbangan sendiri pula, t6anpa [erintah dan pemberitahuan kekuasaan yang lebih tinggi manapun. Demikian pula sang Residen merupakan pedagang tunggal. Dia menganggap dirinya berhak dan berwenang untuk melakukan monopoli ata egala jeni perdagangan diwilayahnya , memaok penduduknya berupa garam, beras dan lain-lain keperluannya, dengan harga

yang menurut pendapatnya endiri layak."

Penarikan para Residen dari karesidenan luar serta penghapusan tanam paksa, merupakan langkah awal yang dilakukan Raffles. Sebagaimana kebijaksanaan Raffles, maka pertimbangan ekonomi merupakan tumpuan dari peraturan-peraturannya yang bersifat kemanusiaan. Dukungan diberikan bagipertanian sukarela, dengan tujuan kesejarahan yang didatangkan akan menguntungkan pihak kompeni Inggris juga. Untuk itu dari setiap keluarga, akan dikumpulkan setiap tahun sebanyak 2 Dollar Sapanyol atau lada sejumlah 50 lbs, selain itu pajak ekspor sebesar 3 Dollar per bahar dikenakan ujntuk perorangan, dam akan dibagikan sama rata antara pihak kompeni Inggris dan kepala adat (Depati dan Pangeran).

Sistem pajak nyang baru dikenal dengan sebutan tribute, untuk lebih pengambilan sukses. sistem pajak diusulkan mempergunakan orang Bugis. Penggunaan orang Bugis ini merupakan dampak dari eratnya hubungan antara Bugis dan Inggris. Hal ini dilakukan karena sistem kontrol dari pemerintah Inggris lebih longgar, serta unjtuk petani terhadap melindungi para tekanan-tekanan dari kepala adat mereka. Dalam peradilan penduduk pribumi, Depati cenderung mempunyai vested interest. Hal ini disebabkan karena adanya hak tradisional mereka untuk memperoleh uang sidang serta uang denda. Untuk mengurangi penguatan mengusulkan sejenis Raffles membayar para kepala adat tersebut berupa gaji tetap, sebagai ganti uang sidang dan uang denda, yang kini merupakan ciri dari semua keperluan administratif. Dalam perjanjian yang dibuat bersama Pangeran Lingang Alam, dari Sungai Lemau, setiap pembarap mkenerima setiap bulannya sebanyak 8 Dollar.⁹

Perombakan yang dilakukan oleh Raffle secara teori banyak dipuji, karena menyangkut kepentingan pemerintayh Inggris, namun bila dilihat banyak prakteknya menimbulkan kesulitan. Petani lada tidak menganggap uang sumbangan itu sebagai alternatif liberal untuk menggagalkan pertanian, malahan dipandang sebagai beban yang memberatkan. Didaerah karesidenan luar yang letaknya agak terpencil terjadi penyelundupan secara besar-bersaran, karena penarikan dilakukan oleh orang Eropa. Selain itu item umbangan yang dilancarkan oleh Raffles mendapat protes masyarakat.¹⁰ dari Masyarakat menganggap bahwa kedaulatan masih berada pada kepala adat.

Walaupun demikian, hak untuk memungut setoran wajib dipegang oleh Kompeni Inggris dan para Depati menuntut pembagian sama rata atas sumbangan yang didapat, dengan mengenyampingkan bahwa kepala adat melakukan (Depati) tidak pernah pemungutan seperti itu. Bila ingin menggambarkan supremasi tentang kompeni.

Rencana pemungutan ini tidak berjalan lancar karena rakyat Rejang dibawah pimpinan Pangeran Lingang Alam melakukan protes ke ibukota untuk mempertahankan status kedaulatan mereka.¹¹ Dengan adanya protes ini maka pemerintah Inggris takut peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 1807 akan

terulang kembali, maka Raffles kemudian menarik kembali kebijaksanaan sumbangan tersebut. Mengenai kegagalan ini kepala pemerintah tinggi di Kalkuta Lord Moira mengatakan:¹²

"Apabila dalam keadaan yang luar biasa dari kedudukan kita terhadap ketergantungan negeri pada Fort Marlbororugh, mempertahankan monopoli lada dalam bentuk pengerahan dan wajib tidaklah tepat kurang bijaksana, lalu hak kita untuk menerapkan sesuatu padanan berupa sumbangan wajib , sebanyak 2 dollar, atau sejumlah 50 pon lada, yang dipungut dari setiap keluarga dapat dikatakan paling tidak sangat meragukan."

Dengan gagalnya kebijaksanaan tersebut, memaksa Raffles untuk lebih banyak memanfaatkan para kepala adat, sambil mengurangi peranan pemerintah Inggris seperti yang dijelaskan oleh Raffles:¹³

"Di negeri dimana pajak bukan menjadi sasaran dan tidak dapat dikutip, maka sulitlah kiranya untuk memperoleh suatu keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam usaha mengesampingkan para kepala adat dan melakukan campur tangan secara langsung terhadap masyarakat."

Dengan keadaan ekonomi yang mendesak, mengharuskan orang mengambil keputusan demikian, secara telah "dirasionalisasikan" khas oleh Raffles ke dalam falsafah yang terpuji dan bertujuan untuk mengubah komunitas Sumatera yang tidak tegar menjadi suatu masyarakat feodal yang stabil mantap serta menikmati pengolahan pertanian sawah yang menetap. Dengan sumbangan kegagalan wajib dan pembaharuan lainnya, membuat Raffles tidak berminat lagi untuk menggalakkan kemajuan dari kekuasaan yang bersifat feodal, seperti yang dipelopori dahulu.

Berdasarkan rencana Raffles, hak pemilih haruslah diberikan kepada para pemimpin bumiputra, yaitu Sultan Anak Sungai, Pangeran Sungai Lemau dan Sungai Itam, serta Kalipa (kepala-kepala distrik diwilayah Bengkulu Selatan), yang terdiri dari 10 untuk Seluma, 13 untuk Manna, dan 8 untuk Kaur. Mereka ini mempunyai tugas dan kewajiban yang langsung dan segera terhadap rakyatnya, termasuk pula mengatur kepolisian. Untuk mencapai maksud tersebut mereka diberikan kekuasaan dan wewenang dilakukan oleh hanya Ingggris. Berbeda dengan rencana yang lalu. sekarang kepala para diperkenankan lagi memperoleh hak tradisional mereka atas uang sidang dan Pengawasan denda. terhadap kekuasaan yang semena-mena diganti dan pembesar pribumi diberi hak pemilikan tanah atas nama pemerintah Inggris.

Dengan demikian pemerintah Inggris masih menguasai wilayah Bengkulu sepenuhnyam bahkan pada awal kedatangan Raffles, yaitu 4 Juni 1818 telah memamdatangani suatu perjanjian nantara pemerintah Inggris dengan Pangeran Linggang Alam, Sungai Itam dan Silebar.14 Dalam perjanjian Kerajaan disebutkan bahwa Lemau diserahkan kepada pemerntah Inggris dan Pangeran Sungai Lemau menjadi pegawai pemerintah dengan gaji sebesar f.106 per bulan ditambah tunjangan f.106 per bulan. Pembayaran gaji ini sebagai pengganti kerugian karena melepaskan hak-haknya atas Kerajaan Sungai Lemau, dan penduduk harus membayar sebesar f.4. Pajak ini ditentang oleh rakyat dengan cara memprotes ke tempat kiediaman Letnan Gubernur Raffles. Akibatnya Raffles marah dan segera mengembalikan kedaulatan raja dan gaji yang telah diterima.¹⁵

Residensi Bengkulu pada tahun 1825 diambil alih oleh Belanda, dan tahun 1826 masuk Residensi Sumatra Barat. Penyerahan Bengkulu kepada Belanda sesuai dengan Perjanjian London 1824. Pada awal masa pemerintahan Belanda di Bengkulu. Masih memberikan tunjangan kepada keempat penguasa pribumi yang ada di Bengkulu. Tetapi secara berlahanlahan dihentikan sama sekali. Penghentian tunjangan kepada pimpinan ketiga wilayah karena keuangan daerah kurang mencukupi, sehingga pemerintah Belanda merasa berat untuk membayar tunjangan yang harus dibayar kepada pemimpin tradisional diwilayah ini.

Walaupun demikian, pembayaran terhadap pembesar pribumi masih terus dilakukan. Ketika keadaan keuangan pemerintah pada tahun 1830 mengalami kesulitan, maka dilaksanakan tanam paksa dan penghematan dalam pemerintahan, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan.

Dalam kebijaksanaan terhadap pembesar-pembesar tradisional seperti dikerajaan Silebar, Sungai Itam dan Sungai Lemau, tata pemerintahan tidak dibubarkan akan tetapi para pangeran dari ketiga kerajaan diberi pekerjan dan tanggung jawab yang berat. Sebelum Knoerle memimpin Bengkulu pemerintah Hindia Belanda membuat suatu

kebijaksanaan yaitu dengan memberi gaji kepada ketiga Pangeran: Pangeran Silebar mendapat gajio f.150 per bulan, Pangeran Sungai Lemau mendapat gaji f.400 per bulan dan Pangeran Sungai mendapat gaji f.600 per bulan. Pemberian gaji ini dimaksudkan agar para pemimpin mempergunakan yang ada dapat pengaruhnya dalam usaha untuk menambah kas pemerintayhan daerah berkurang. mulai Pada pemerintahan Knoerle ketiga pangeran tersebut gajinya menjadi pertahun dan dikurangi, jumlahnya dimana gaji Pangeran Silebar f.300 dan Pangeran Sungai Lemau dan Sungai itam f.900.

Selain tindakan Knoerle terhadap pembesar tradisional di Sungai Lemau, Siungai Itam dan Silebar, Knoerle juga pada tahun 1832 membawa Sultan Mukomuko dengan kekerasan di Bengkulu, dan pemerintayhan di Muko-muko diserahkan oleh Knoerle kepada seorang saudagar bangsa Eropa yang bernama penyerahan kekuasaan suatu wilayah kepada seorang saudagar merupakan suatu tindakan politik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Tindakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghasilan pemerintah Belanda.

Kesimpulan

Tindakan Knoerle yang lainnya teryhadap para Pangeran terjadi pada tahun 1833, ketika Pangeran Linggang Alam, Penguasa Sungai Lemau meninggal dunia. Sejak itulah tugas-tugas untuk sementara dibebankan kepada anak sulungnya yang bernama Raja Putu Negara dengan gelar Bupati, dengan tunjangan sebesar f. 2000 per bulan.

Setelah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Knoerle. Salah satu sebab Knoerle dibunuh adalah tindakannya yang mengurangi gaji dari Pangeran serta tunjangan lainnya. Setelah terbunuh Jabatan Asisten Residen Bengkulu dipegang oleh Francis hingga tahun 1835.

Tindakan pemerintah Belanda terhadap pembesar pribumi terjadi lagi pada tahun 1860-1870. Dimana pamerintah Hindia Belanda menghapus kedudukan Pangeran yang ada di Sungai Lemau, Sungai Itam, Silebar dan Anak Sungai.¹⁶

Referensi

¹Wink.P. "Eenige Arschriftstukken betreffende de vestinging van de EngelscheFactorij" BKI LXIN 1924, hal. 478.

²KolonialTijschrift XVII, 1924, hal. 624.

³York Fort to Madras, Oct. 1685, Wink, Op.Cit, hal. 467.

⁴Marsden W., History of Sumatra, hal 210.

⁵Wels, Loc.Cit., 1973, hal. 251.

⁶Bastin, John, *The British in West Sumatra* (1685-1825), 1965, hal. 96.

⁷Weels, Loc.Cit., hal. 254.

8Ibid.,hal 225.

⁹Bastin, Op.Cit., hal. 164.

¹⁰Ibid...

¹¹Protes ini dilakukan oleh Pangerang Lingang Alam bersama dengan Masyarakat pergi ke Fort Marlborough untuk menemui Raffles.

¹²P.H. van der Kemp. "Benkoelenkrachtens het LondenschTractaat van 17 Maart 1824", BKI LV, 1903 hal. 314.

¹³Bastin, *Op.Cit.*,hal. 96.

¹⁴Francis. Loc. Cithal. 145.

¹⁵Knoerle, Oosterling, 1832.

16"Politiekverslag der Asistent Residentie Benkoelen over het jaar 1861"; "PolitiekVerslag over het jaar 1871"; pertama di Sungai Lemau (1861) dengan Besluit tanggal 5 Desember 1861. Kemudian Sungai Itam (1862) dengan Besluit 25 Desember 1862, serta Silebar (1864) berdasarkan Besluit 22 Januari 1864 No. 34 dan akhirnyaMuko-muko 1870, Besluit 22 April 1870 No. 49. Penghapusan keempat pangeran di empat wilayah, karena sejak 1833 para Pangeran sudah menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Belanda; lihat juga Helfrich, *Loc.Cit.*, hal., 320.